

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Yogyakarta hingga saat ini dikenal dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta karena menurut sejarahnya Yogyakarta pernah menjadi peralihan ibu negara bagi Indonesia ketika itu. Sebutan-sebutan lainnya adalah kota pelajar yang mana di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar sarana pendidikan berupa sekolah-sekolah negeri maupun swasta mulai dari tingkat play group hingga perguruan tinggi / universitas. Tidak tanggung-tanggung Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai standar pendidikan setelah kota Jakarta. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai kota budaya karena dilihat dari tingginya nilai seni yang terkandung dalam keanekaragaman kesenian tradisional dan arsitektur bangunan bahkan tata kotanya, selain itu banyak sastrawan, budayawan, seniman dan musisi terkenal yang terlahir di Yogyakarta. Keindahan alam yang dimiliki dan berbagai peninggalan sejarah menjadi objek wisata yang menjadi tujuan wisata wisatawan mancanegara setelah pulau Bali.

Banyaknya potensi daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi peluang yang cukup besar bagi pengadaan hubungan kerjasama dengan pihak asing maupun domestik. Sebagai provinsi yang terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dan disesuaikan dengan undang-undang nomor yang

mengatur otonomi daerah, maka provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kebebasan kepada sub daerahnya untuk mengatur pemerintahannya.

Aktor non negara termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah berhak mengadakan hubungan diplomatik dengan berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi salah satu model hubungan transnasional dimana hubungan kerjasama ini bersifat damai dan tidak memperhatikan adanya batas-batas wilayah geografis.

Dewasa ini semakin banyak Pemerintah Daerah yang berkeinginan menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk *sister province / state / prefecture* dan *sister city* dalam dan luar negeri.¹ Hubungan transnasional ini telah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan sejak tahun 70an. Mengacu pada pengalaman tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerima tawaran kerjasama *sister city* dari Pemerintah Gangbuk-gu. Penandatanganan MoU kerjasama secara resmi ditandatangani pada awal tahun 2005.

Bahwasannya Gangbuk-gu merupakan sub daerah dari Seoul Republik Korea yang namanya tidak begitu populer ditelinga kita. Sehingga adanya hubungan kerjasama ini menjadi topik yang menarik bagi penulis. Dengan demikian pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai :

Kerjasama Sister City Antara Kota Yogyakarta Dengan Gangbuk-Gu Tahun 2005

¹ Sidik Istikom, *Geografi Regional dan Regionalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

B. Tujuan Penulisan

Adapun arah dan sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya MoU kerjasama *sister city* antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu
2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis
3. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan menuangkannya kedalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
4. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terletak di posisi silang di kawasan Asia Tenggara memberikan peluang yang cukup besar untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara-negara benua Asia, terutama dengan negara-negara kawasan Asia Timur. Adapun contoh hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Timur misalnya

Indonesia dengan China, Indonesia dengan Jepang maupun Indonesia dengan Republik Korea.

Republik Korea memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dimana hubungan ini telah terjalin sejak tahun 70-an. Hubungan diplomatik ini diawali dengan dibentuknya kerjasama dalam bidang ekonomi dan teknik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea pada tahun 1971. Dengan berjalannya kerjasama tersebut maka membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelebaran hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, misalnya bidang kehutanan, bidang teknik - budaya, penanaman modal / investasi, dan lain sebagainya.²

Simbol dari keajaiban ekonomi Asia Timur dan simbol dari keajaiban ekonomi Korea disandang oleh Seoul yang merupakan ibukota Republik Korea.³ Disebut demikian karena setelah adanya krisis moneter tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Republik Korea dianggap sebagai contoh kasus yang berhasil mencapai tahap demokrasi.⁴ Ketika itu Republik Korea juga tidak terlepas dari jeratan krisis moneter yang mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang Korea terhadap dollar Amerika (US\$). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Republik Korea hingga pada akhirnya menemukan jalan keluarnya, dan dalam perkembangannya Republik Korea mulai menunjukkan kemantapan pergerakan ekonominya.

² <http://www.indonesiaseoul.org/indonesia/ekonomidanindustri/industri.htm>, akses tanggal 18 April 2008

³ <http://groups.or.id/wikipedia/id/s/e/o/Seoul.html>, akses tanggal 22 Februari 2008

⁴ Tulus Warsito, *Nosajeong : Rahasia Kebangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hal 160

Sedangkan Indonesia mulai mengalami perkembangan ekonomi sejak tahun 1990-an dengan laju pertumbuhan diatas rata-rata perkembangan ekonomi negara berkembang.⁵ Namun krisis moneter pada tahun 1997 menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan hingga pada tahun 2008 pun Indonesia belum dapat melepaskan diri dari adanya jeratan krisis moneter tersebut.

Situasi dan kondisi negara secara tidak langsung membawa dampak bagi perkembangan daerah yang ada di dalam negara tersebut. Seperti halnya dengan kondisi yang dialami Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota di Indonesia juga terkena dampak negatif dari adanya krisis moneter. Kota Yogyakarta yang dalam menjalankan perekonomiannya tergantung pada sektor kepariwisataan. Sektor ini ditunjang oleh keberadaan objek-objek wisata yang tersebar di Kota Yogyakarta. Sebagian besar masyarakatnya bergerak dalam bidang jasa, pengusaha, industri kecil maupun industri menengah. Seperti mendirikan toko souvenir, kerajinan tangan, penyediaan jasa transportasi, dan lain-lain. Akibat dari krisis tersebut menjadikan segala bentuk transaksi ekonomi melambung tinggi dan pada akhirnya banyak pengusaha / industri yang gulung tikar.

Gangbuk-gu sendiri merupakan sebuah kota baru yang berasal dari pemekaran atas Kota Dobong-gu, Republik Korea disebabkan karena tingginya tingkat kepadatan penduduk. Lazimnya sebuah kota yang berdiri sendiri mengalami proses pembentukan Pemerintahan Kota beserta perangkat-perangkat

⁵ Faizal Basri, *Perkonomian Indonesia Menjalang Abad XXI: Distorsi Kebijakan dan Kendala*

lainnya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana wujud pelayanan pemerintah kota terhadap masyarakatnya. Pemanfaatan sumber daya lokal menjadi sumber utama bagi proses pengembangan kota. Sumber daya lokal tersebut dapat berasal dari sumber daya manusia dan dari sumber daya alam yang dimiliki.

Kebudayaan Gangbuk-gu banyak dipengaruhi oleh agama Budha. Sehingga peninggalan-peninggalan sejarahnya sebagian besar dapat dilihat dari seni arsitektur bangunannya dan ritual-ritual tradisional yang masih melekat pada kehidupan masyarakat. Dari seni arsitektur bangunannya dapat terlihat dari kuil-kuil yang dipakai masyarakat Gangbuk-gu untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan, dan terlihat dari pakaian adat yang dikenakan pada waktu pelaksanaan suatu upacara agama.

Kota Yogyakarta dahulu merupakan kerajaan Mataram yang menganut agama Hindu yang kemudian agama Islam mempengaruhi kerajaan Mataram maka terciptalah kerajaan Mataram Islam. Sehingga banyak dari peninggalan-peninggalan budaya Yogyakarta yang terpengaruhi agama Hindu. Adapun peninggalan agama Hindu seperti labuhan ke pantai Parangkusumo, Gunungan sedangkan agama Hindu yang sudah tercampur dengan agama Islam seperti Sekaten / pasar malam selama satu bulan menjelang bulan Mulud dan wayang kulit / wayang orang.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berstatus sebagai daerah propinsi sedang mencanangkan daerahnya menjadi pusat pendidikan se Indonesia bahkan

se Asia Tenggara. Dalam hal ini kontribusi dalam bidang pendidikan untuk Kota

Yogyakarta memiliki peranan yang cukup penting misalnya dengan keberadaan universitas-universitas dan beberapa lembaga pendidikan lainnya. Sehingga dengan demikian Kota Yogyakarta dituntut untuk mengembangkan infrastruktur maupun suprastrukturnya. Dengan berbagai pengembangan ini diharapkan mampu mengimbangi upaya pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020.⁶

Pada sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius dari masing-masing pemerintah kota sebagai tempat pembelajaran bagi generasi penerus yang akan mengendalikan roda pemerintahan selanjutnya. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan kompeten maka keberlangsungan dan kemajuan kota dapat di capai.

Pertumbuhan di berbagai sektor dapat dikatakan berhasil ketika kota memiliki batu loncatan dalam mengembangkan kotanya. Karena dengan adanya batu loncatan (partner kota) ini kedua kota dapat bercermin sampai sejauhmana percepatan pertumbuhan yang telah dilakukannya. Pada tanggal 19 Juli 2003 Gangbuk-gu melayangkan surat keinginan untuk mengadakan kerjasama terhadap Kota Yogyakarta. Keinginan kerjasama yang ditawarkan adalah untuk membentuk kerjasama *sister city* diantara kedua kota. Selanjutnya persetujuan untuk mengadakan kerjasama yang diawali dengan penandatanganan surat keinginan bersama (LoI) pada tanggal 14 Januari 2004 dan kemudian mencapai tahap MoU pada tanggal 19 April 2005.

⁶ <http://students.ukdw.ac.id/~22002471/visi%20dan%20misi.html>, akses tanggal 12 Februari 2008

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka memunculkan pertanyaan : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian MoU kerjasama *sister city* antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu ?

E. Kerangka Teori

Hubungan antar dua negara atau lebih yang melintasi batas yurisdiksi suatu negara adalah pengertian dari hubungan internasional. Adanya perubahan lingkungan internasional yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan permasalahan yang dihadapi menjadi semakin kompleks. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menggunakan beberapa konsep sebagai penjabarannya, konsep-konsep tersebut antara lain :

1. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, *outonomos / autonomia*”, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*).⁷ Istilah otonomi mengandung pengertian, sebagai berikut :

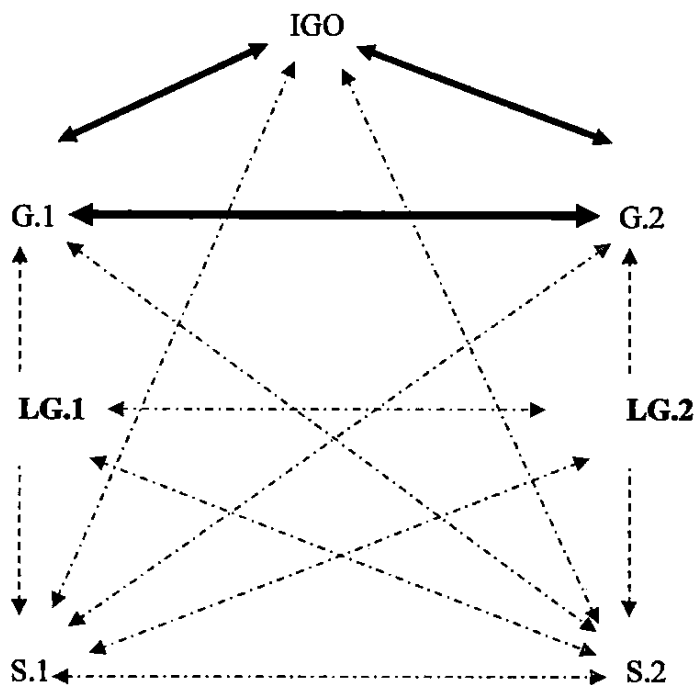
⁷ Hugo F. Reading, Kamus Ilmu Sosial, CV Rajawali, Jakarta, 1996 dalam buku Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Bersektif Hubungan Internasional, BICRAE Publikasi, Yogyakarta

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self-government, self determination*)
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal-affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
4. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi / dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Hubungan diplomatik dalam kerangka interaksi transnasional dan politik antar negara⁸ dimana hubungan diplomatik yang terjalin biasanya dilakukan oleh aktor negara maupun individu. Di Indonesia mengenal adanya otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 pasal 7 ayat 1 dan 2. Mengenai hubungan diplomatik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dijelaskan dalam pola hubungan internasional yang bersifat transnasional menurut Sidik Jatmika (gambar 1.1).

⁸ Adaptasi dari R.O Keohane dan J.S. Nye, *Transnasional Relations and World Politics*, Harvard UP, 1977. Dalam buku Moeslim, *Hubungan Internasional dan Politik*

Gambar 1.1 Pola Hubungan Internasional Bersifat Transnasional, Dimana Local Government (Pemerintah Daerah) Merupakan Aktor / Pelaku “Baru” Hubungan Internasional⁹



Keterangan :

———— = Politik antar negara

..... = Politik dalam negeri

- . - . - . = Interaksi Transnasional

G [1,2] = Pemerintah Pusat

⁹ Sidik Jatmika, *ibid.*, hal 54

L.G [1,2] = Pemerintah Daerah

S [1,2] = Masyarakat (termasuk di dalamnya adalah Masyarakat Bisnis)

IGO = Inter Governmental Organisation

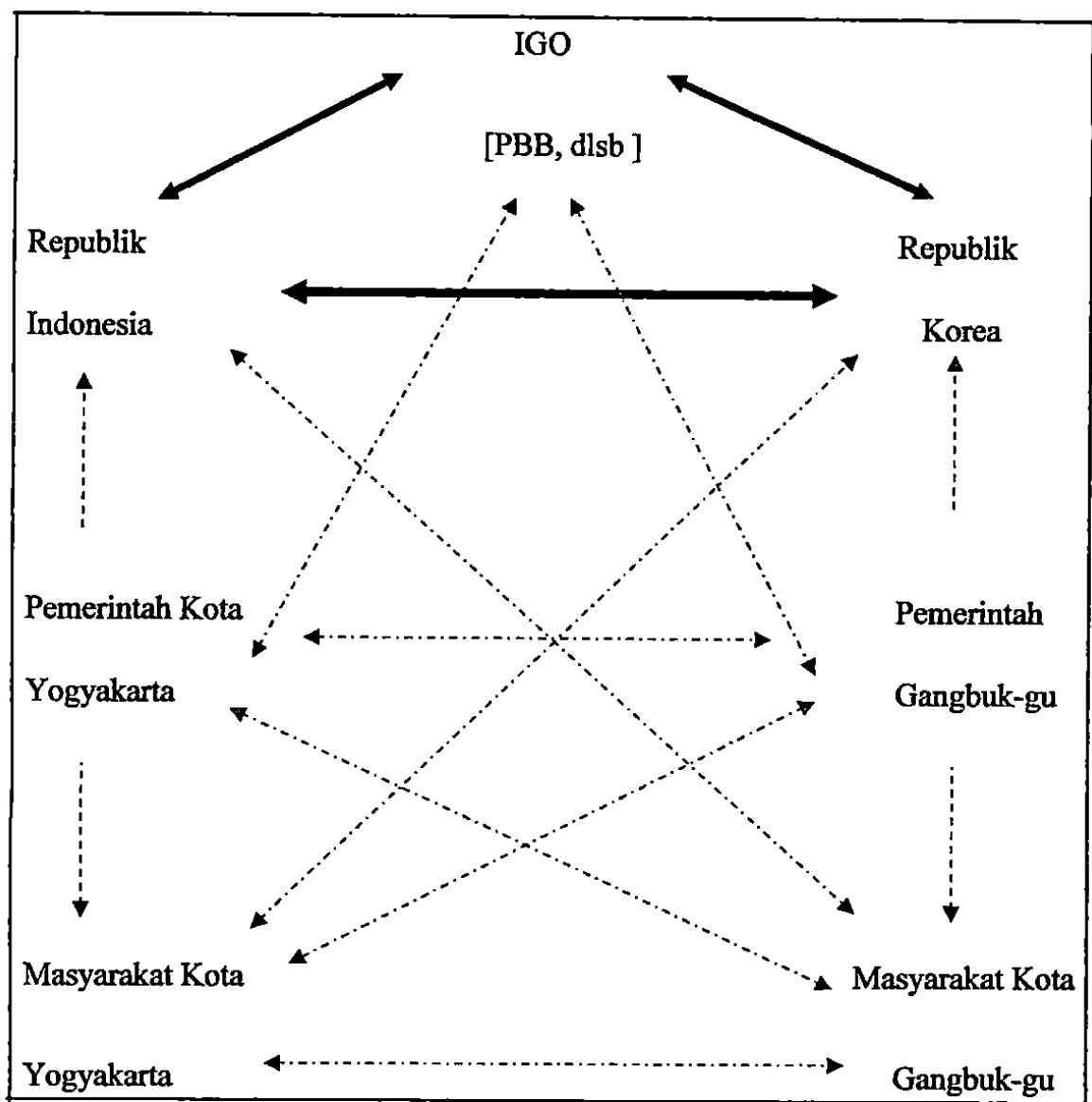
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Korea membawa pengaruh signifikan bahwa hubungan dua negara tersebut tidak hanya difokuskan kepada *state to state* tetapi juga pada daerah to daerah dimasing-masing negara. Ditambah lagi dengan melihat konstelasi dunia yang semakin maju menyebabkan pergeseran hubungan tersebut (S to S), yang kemudian pelaksanaannya juga bisa dilakukan oleh negara dengan daerah suatu negara, daerah suatu negara dengan daerah suatu negara.

Model hubungan transnasional telah berkembang seiring dengan masuknya aktor non negara yang mampu mengadakan hubungan diplomatik dengan berbagai pihak. Yang dimaksud dengan aktor non negara disini adalah Pemerintah Daerah (*Local Government*) dianggap sebagai aktor baru dalam pelaksanaan hubungan transnasional yang berfungsi sebagai pembantu Pemerintah Pusat dalam mengelola daerahnya.

Pola interaksi internasional Kota Yogyakarta dalam kerjasamanya dengan Gangbuk-gu, Republik Korea dapat dijelaskan dalam kerangka transnasional yang

melibatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor baru dalam pelaksanaan hubungan

Gambar 1.2 Pola Interaksi Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu Dalam Hubungan Transnasional



Jika konsep ini di aplikasikan, pada garis tebal berwarna hitam menjelaskan adanya keikutsertaan berbagai negara khususnya Republik Indonesia dan Republik Korea dengan organisasi internasional. Organisasi internasional misalnya : PBB, WHO, Green Peace, UNICEF dan lain sebagainya. Sedangkan garis tebal horisontal menunjukkan adanya hubungan diplomatik antara dua

negara yakni hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea.

Dalam garis berwarna merah vertikal putus-putus, garis vertikal dengan mata panah keatas dapat diartikan sebagai status Pemerintah Kota Yogyakarta berada di bawah garis koordiasi Pemerintah Pusat Indonesia, dan Pemerintah Gangbuk-gu berada di bawah koordinasi Pemerintah Pusat Korea. Sedangkan pada garis vertikal dengan mata panah kebawah dapat diartikan sebagai Pemerintah Kota Yogyakarta dan Gangbuk-gu memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya.

Garis putus titik berwarna biru menjelaskan adanya hubungan transnasional yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Pada perkembangannya, hubungan internasional kini dapat dilaksanakan oleh semua pihak termasuk didalamnya adalah keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah Daerah di negara lain. Seperti hubungan kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu yang berlainan negara, namun dengan kesamaan status administratif inilah yang membawa lingkup kerjasama sebatas kota.

Kota Yogyakarta dibekali dengan UU 22 tahun 1999 dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Pemerintah Kota diberi kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kewenangan disini berarti kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta

menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerjasama”¹⁰

Dewasa ini, interaksi antar negara telah mengubah arahnya kepada interaksi damai atau bebas konflik. Permasalahan - permasalahan yang dihadapi pun semakin berfariatif, mulai dari isu lingkungan global seperti masalah kesehatan, tingkat polusi udara, perdagangan, ketenagakerjaan, krisis ekonomi dan lain sebagainya mampu menyerap perhatian dari setiap negara untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi berbagai permasalahan tersebut.

Dengan masuknya aktor non negara (*local government*) yang terlibat dalam hubungan internasional menjadikan aktor ini ikut berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan – permasalahan tersebut. Meskipun kedudukannya tidak sejajar dengan negara namun permasalahan domestik yang hampir dirasakan oleh setiap daerah mendorong daerah - daerah tersebut untuk saling bekerjasama.

Hubungan kerjasama tersebut tidak hanya di level nasional saja melainkan kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan beberapa daerah setingkat di luar negeri. Hal ini mengacu pada undang-undang kebebasan daerah di Indonesia untuk mengatur wilayahnya secara otonom.

Dan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia tersurat dalam UU No 37 / 1999 pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa :” Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang

¹⁰ KI Holsti “*Politik Internasional Studi Analisis Hubungan Internasional*” Erlangga, Jakarta

menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.”¹¹

Dalam aplikasinya terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Gangbuk-gu adalah sebagai berikut :

Kota Yogyakarta memiliki otonomi daerah yang mengatur tentang kewenangan dan keleluasaan Pemerintah Daerah / Kota dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan bersandarkan pada undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta berkesempatan untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan dalam kasus ini adalah mengadakan hubungan kerjasama dengan Gangbuk-gu, Republik Korea.

Kerjasama yang akan dibentuk oleh Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu pada dasarnya bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama dimana masing-masing pihak saling melengkapi adanya kekurangan dengan kelebihan masing-masing kota.

Keberadaan potensi daerah juga termasuk sebagai salah satu hal yang sangat mendasar bagi terbentuknya hubungan kerjasama, karena potensi daerah yang ada di Kota Yogyakarta maupun di Gangbuk-gu dapat digunakan sebagai

¹¹ Sambutan menteri luar negeri, Hassan Wirajuda, mengenai revisi buku “Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah 2003”

pertimbangan awal mengenai kemampuan kota dan untuk menentukan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan.

Dengan melihat berbagai kriteria yang ada diantara kedua kota dan ditambah dengan berbagai potensi yang ada maka Pemerintah kota Yogyakarta memandang dan mempertimbangkan bahwa kerjasama ini akan membawa perubahan kearah perkembangan kota, sehingga Kota Yogyakarta bersedia untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk *sister city*.

3. Konsep Sister City

Menurut Sidik Jatmika dalam bukunya Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional memberikan pengertian tentang hubungan kerjasama *sister city*, yakni

“Hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten, Kota dan Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, kontribusi biaya masing-masing pihak,, dan lamanya waktu yang di perlukan bagi program kegiatan yang di kerjasmakan.”¹²

Pendapat diatas diterangkan pula dengan adanya pengertian *sister city* /

“Town twinning is a concept whereby towns or cities in geographically and politically distinct areas are paired, with the goal of fostering human contact and cultural links. Sister cities often (though by no means always) have similar demographic and other characteristics. In practice, the twinning arrangements often lead to student exchange programs, as well as economic and cultural collaborations.”¹³

Lebih lanjut hubungan kerjasama *sister city* hanya merupakan kegiatan insidental yang berupa hubungan surat menyurat, tukar menukar informasi, kunjungan misi kebudayaan / kesenian, promosi pariwisata dan kunjungan persahabatan biasa antara kedua Pemerintah Daerah/Kota, yang pada perkembangannya lebih mengarah kepada bidang-bidang ekonomi dan perdagangan.

Dari sekian banyaknya model kerjasama yang dapat dijalin oleh Pemerintah Daerah. *Sister city* menjadi sebuah alternatif kerjasama yang sering kali dipakai untuk mengembangkan persahabatan antar kota-kota / antar pemerintah daerah, menciptakan peluang bagi warga kota untuk menimba pengalaman dan menjelajahi kebudayaan lain melalui proyek jangka panjang, menciptakan suasana dimana hubungan ekonomi dan jalinanperdagangan dapat di kembangkan atau di implementasikan dan di perkuat, serta dapat mendorong lingkungan di mana mitra masyarakatnya dapat belajar lebih kreatif, bekerja, memecahkan persoalan bersama. (Kompas, 22 Agustus 1997) Pembentukan kerjasama *sister city* ini dapat mencakup berbagai bidang atau subjek kerjasama

¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/Town_twinning, akses tanggal 31 Maret 2008

dalam satu hubungan kerjasama. Sehingga kota dapat meraih pembangunan berkala meskipun dengan satu partner kota saja.

Kerjasama secara *sister city* lebih menekankan kepada kesamaan-kesamaan kondisional kota, yang mana kesamaan-kesamaan tersebut menjadi faktor yang paling utama dalam mengadakan kerjasama kota kembar. Mengingat kerjasama yang mengarah kepada kota kembar maka segala aspek yang selaras menjadi pengikat bagi kedua belah pihak dalam mengembangkan kerjasama tersebut.

Adapun bidang-bidang yang boleh dijadikan subjek kerjasama antar daerah / kota dalam kerjasamanya sebagai kerjasama *sister city*, bidang-bidang tersebut¹⁴ antara lain :

1. Kerjasama Ekonomi dalam bidang : Perdagangan, Investasi, Ketenagakerjaan, Kelautan Dan Perikanan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan Dan Kependudukan, Pariwisata Dan Perhubungan, Lingkungan Hidup
2. Kerjasama Sosial Budaya dalam bidang : Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Kewanitaan, Olahraga, Kesenian
3. Bentuk Kerjasama Lainnya.

¹⁴ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri*, Jakarta, 1992, hal. 114.

Sebagai kota yang berlainan negara, tentu saja memiliki berbagai perbedaan dari segi ekonomi, adat, bahkan secara geografinya dapat dikatakan hampir tidak mungkin dipadukan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa hal yang apabila diteliti lebih lanjut memiliki pokok-pokok persamaan yang hampir semua daerah memilikinya. Hal ini disesuaikan dengan Permendagri dalam Surat Edaran Mendagri No.193/1652/PUOD tertanggal 26 April 1993, pembentukan hubungan kerjasama *sister province* dan *sister city* harus didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut : kesamaan kedudukan dan status administratif kota, kesamaan besaran dan fungsi, kesamaan mengenai karakteristik, kesamaan permasalahan, ilmu dan teknologi yang dapat dialihkan, dan komplementaritas antara kedua belah pihak dalam bidang ekonomi, sehingga dapat menimbulkan aliran barang antara kedua belah pihak.

Dari keenam kriteria diatas yang menjadi faktor yang mempengaruhi Kota Yogyakarta yang kemudian menjadi pendorong untuk terciptanya hubungan kerjasama *sister city* dengan Gangbuk-gu adalah adanya kesamaan dari segi kedudukan dan status sebagai kota, adanya kesamaan karakteristik daerah yang mengacu pada kebudayaan asli daerah, dan kesamaan permasalahan diantara kedua kota.

Beberapa pokok bidang yang bersama-sama disepakati dan akan dilaksanakan bersama untuk menguji kerjasama *sister city* ini adalah terdiri dari

empat bidang pokok. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah bidang ekonomi, administrasi publik / daerah, kebudayaan dan pendidikan.¹⁵

F. Hipotesa

Berdasarkan aplikasi pada kerangka dasar pemikiran dan rumusan masalah diatas, maka dapat dihasilkan kesimpulan sementara. Yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian MoU kerjasama *sister city* antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesamaan-kesamaan diantara kedua kota. Kesamaan tersebut dalam kedudukan dan status administrasi antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu, kesamaan dalam karakteristik yang dilihat dari segi budaya daerah, dan kesamaan dalam permasalahan yang ada di masing-masing kota.
2. Adanya kepentingan Kota Yogyakarta yang terlegalkan oleh adanya peraturan hukum.
3. Adanya potensi Kota Yogyakarta yang dapat disinergikan dengan potensi Gangbuk-gu.

¹⁵ Lihat dalam lampiran tentang rancangan bidang kerjasama yang akan dilaksanakan Kota

G. Jangkauan Penelitian

Supaya pembahasan ini tidak terlalu melebar maka penulis menetapkan batasan lingkup penelitian kepada kerjasama Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, penulis akan meneliti salah satu kerjasama yang telah dilakukan oleh Kota Yogyakarta yakni dengan pihak Gangbuk-gu Korea Selatan. Penulis akan lebih mengarahkan penelitian ini kepada faktor – faktor yang mempengaruhi terciptanya kerjasama tersebut.

Adapun penulis menetapkan jangkauan penelitian agar penulisan ini tidak terlalu melebar yakni data yang diambil dari tahun 2003 sebelum terjadinya hubungan kerjasama sampai terciptanya hubungan kerjasama tahun 2005. Tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian, namun hal ini hanya sebagai referensi atau catatan saja.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Lexy J. Moleong, M.A., dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang

¹⁶ Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

dikumpulkan berkemungkinan sebagai kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Meskipun demikian, penelitian secara kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Akan tetapi tidak terlalu banyak berdasarkan diri atas data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara untuk menghantar dan mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.¹⁷

2. Interview (*wawancara*)

Merupakan proses tanya jawab secara lisan kepada Dinas-dinas terkait di Kota Yogyakarta dengan berhadapan langsung secara fisik dengan koresponden, wawancara yang dilakukan yaitu dalam bentuk quisioner (pertanyaan) baik yang telah dipersiapkan maupun secara spontan. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas bertanggung jawab, karena dalam wawancara unsur kebebasan wajib dipertahankan namun tetap menjaga etika-etika yang berlaku dalam wawancara. Sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal dan akan memperoleh data secara mendalam.

3. Penelitian Kepustakaan

Adalah memperoleh data dan konsep melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi lainnya seperti dokumen, kliping, koran, surat kabar dan lain-lain

ian yang terdapat di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota
uk-gu. Selain itu penulis juga menggunakan relevansi data-data yang
eh dari berbagai situs internet.

tematika Penulisan

apun sistematika penulisan yang akan ditampilkan penulis adalah sebagai

:

BI . Pendahuluan. Bab ini berisi tentang : alasan pemilihan judul,
penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan
ran, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan
atika penulisan.

B II Kondisi Kota Yogyakarta dan Gangbuk-gu. Bab ini menguraikan
g Kondisi Kota Yogyakarta dan Gangbuk-gu. Pada sub bab berisi tentang
kota, letak geografi, klimatologi, tipologi, perekonomian, administrasi
, pendidikan, religi/ kepercayaan, kebudayaan, pemerintahan, serta simbol-
kota.

B III Kerjasama sister city antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu.
ni membahas mengenai kerjasama yang di jalin Kota Yogyakarta dengan
uk-gu. Pada sub bab pertama akan dibahas mengenai landasan kebijakan
intah yang berisi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan kebijakan
ri. Kemudian pada sub bab lainnya akan membahas mengenai kerjasama

ti antara Kota Yogyakarta dan Gangbuk-gu yaitu tentang hubungan

Indonesia dengan Korea Selatan, proses terbentuknya kerjasama *sister city* antara kedua kota

BAB IV Bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian MoU kerjasama *sister city* antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu. Adapun sub bab pertama adalah mengenai adanya kesamaan antara Kota Yogyakarta dengan Gangbuk-gu, adanya kepentingan Kota Yogyakarta yang terlegalkan oleh adanya peraturan hukum, dan adanya potensi Kota Yogyakarta yang dapat disinergikan dengan potensi Gangbuk-gu.

BAB V Kesimpulan. Bab ini berisikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian disertai dengan kritik dan saran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.